

TEKAN KEMISKINAN DAN KEMISKINAN EKSTREM, PEMPROV RIAU ALOKASI ANGGARAN RP1,563 TRILIUN LEBIH



Sumber gambar:

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2024/06/10/1006-2024-Bantuan-Dumai.jpg.webp>

Pemerintah sampai saat ini masih terus berupaya menurunkan angka kemiskinan. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, secara bersama-sama berkolaborasi dengan berbagai program sehingga target angka kemiskinan, dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Indonesia menjadi 0% tercapai. Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto saat menghadiri Launching Kartu Sosial Berkhidmat 2024 sekaligus menyerahkan bantuan sosial di di Gedung Sri Bunga Tanjung Kota Dumai, Senin (10/6/2024).

"Menjadi salah satu fokus di masa transisi kepemimpinan yang relatif singkat ini upaya yang akan dilaksanakan dalam menekan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Riau telah mengalokasikan anggaran sejumlah Rp. 1,563 Triliun lebih," terang SF Hariyanto. Terangnya, adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu pengurangan beban melalui bantuan sosial dan jaminan sosial, JKN, BPJS Rentan, Bantuan pendidikan, Bantuan sembako, BLT Tunai dengan alokasi anggaran Rp770,43 Milyar.

Kemudian peningkatan pendapatan melalui program pemberdayaan masyarakat, pelatihan, pemberian bantuan alat kelompok tani, peternakan dan perikanan serta Padat Karya dengan alokasi anggaran Rp71,78 Milyar. "Kita juga melakukan pengurangan kantong kemiskinan melalui pembangunan rumah layak huni sebanyak 305 unit, sanitasi dan lain-lain dengan alokasi anggaran Rp. 721,20 Milyar," imbuhnya.

Salah satu program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau adalah melalui Program Bantuan Keuangan Khusus kepada 4.921 Kartu Keluarga. Adapun bantuan yang diterima sebesar Rp300 ribu/KK selama 12 bulan dengan total bantuan sebesar Rp. 17.713.800.000. "Untuk diketahui, adapun penerima bantuan di Kota Dumai sebanyak 1.003 KK. Sedangkan bantuannya berjumlah Rp. 3.610.800.000," pungkasnya.

Berikutnya program pemberdayaan masyarakat, pelatihan, pemberian bantuan alat kelompok tani, peternakan dan perikanan serta padat karya dengan alokasi anggaran sebesar Rp71,78 miliar.

Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto meminta penerima bantuan agar menggunakan uang sesuai kebutuhan sehari-hari jangan belikan rokok, semoga bantuan yang disalurkan ini dapat meringankan beban masyarakat kita yang kurang mampu.

Sumber berita:

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/85857/tekan-kemiskinan-dan-kemiskinan-ekstrem-pempr.html>, "Tekan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem, Pemprov Riau Alokasi Anggaran Rp1,563 Triliun lebih". 10 Juni 2024;
2. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/111416/2024/06/10/tekan-kemiskinan-ekstrem-ini-upaya-pemprov-riau#sthash.jN3rYbDQ.dpbs>, "Tekan Kemiskinan Ekstrem, Ini Upaya Pemprov Riau", 10 Juni 2024; dan
3. <https://www.antaraneews.com/berita/4145640/riau-alokasikan-rp156-triliun-percepat-entaskan-kemiskinan-ekstrem>, "Riau Alokasikan Rp1,56 Triliun Percepat Entaskan Kemiskinan Ekstrem", 10 Juni 2024.

Catatan:

Dalam Bab II Lampiran I Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pengertian kemiskinan ekstrem yaitu kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada Layanan Sosial.

Berdasarkan Bank Dunia, Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi

pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem.

Untuk mengetahui jumlah dan angka miskin ekstrem setiap tahunnya digunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Susenas Maret 2021 menunjukkan:

1. angka kemiskinan ekstrem sebesar 2,14% dari total penduduk Indonesia;
2. sekitar satu di antara tiga kepala rumah tangga miskin ekstrem, status pendidikannya tidak bersekolah atau tidak lulus SD;
3. sekitar satu dari tujuh kepala rumah tangga miskin ekstrem adalah perempuan;
4. sekitar satu di antara lima rumah tangga miskin ekstrem memiliki anggota rumah tangga penyandang disabilitas;
5. sekitar satu di antara dua rumah tangga miskin ekstrem tidak mendapat
6. akses terhadap sanitasi layak; dan
7. sekitar satu di antara tujuh rumah tangga miskin ekstrem tidak memiliki toilet.

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, bahwa Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:

1. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; dan
4. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau